

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S., & Sumantri, I. (2016). *ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Teori dan Praktik*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Ariga, D., & Jumianti. (2021). Koordinasi Pemerintahan dalam Penanggulangan Peladangan Ganja pada Kabupaten Gayo Lues. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 3(2), 144–153.
- Avanar Noegroho, A. B., & Arif, L. (2023). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Umkm Puduk Di Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik. *Journal Publicuho*, 5(4), 1405–1414. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.85>
- Azhari, R. (2017). Koordinasi Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Sesayap Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 543–556.
- Candra Wijaya, D., & Rifa'i, M. (2016). *Dasar Dasar Manajemen Mengoptimalkan Pengelolaan Organisasi Secara Efektif dan Efisien* (S. Saleh S. Sos, ed.). Retrieved from <http://repository.uinsu.ac.id/2836/>
- Fatmawati. (2017). Koordinasi Camat Dalam Proses Pembangunan Di Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali. *Jurnal Katalogis*, 5(12), 55–66.
- Handyaningrat, S. (1992). *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: CV.Haji Masagung.
- Handyaningrat, S. (2017). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen* (Cetakan 8). Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Ihsan, Abdul Khair, Mahsyar, A., & Rahim, S. (2016). Koordinasi Fasilitator Masyarakat

- Dengan Pemerintah Desa Dalam Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Di Kabupaten Luwu Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(April), 1–15.
- Manoppo, I. R. A., Mantiri, M., & Sambiran, S. (2017). Fungsi Koordinasi Pemerintahan Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan (Studi di Desa Buisse Kecamatan Siau Timur Kabupaten Sitaro). *Jurnal Eksekutif*, 2(2).
- Muhaimin, H. (2019). Tata Kelola Pariwisata dalam Pengembangan Potensi Desa. *Journal of Governance Innovation*, 1(1), 1–12.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Menteri dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 mengenai Pedoman Pembangunan Desa.
- Rinto, M., Muhiddin, A., & Mone, A. (2021). Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Laikang Kabupaten Takalar. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 2(1), 24–37. <https://doi.org/10.47134/villages.v2i1.11>
- Rohman, A. (2017). *Dasar dasar manajemen*. Retrieved from [https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/6350/Bab 2.pdf?sequence=11](https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/6350/Bab%202.pdf?sequence=11)
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian* (Ayup, ed.). Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugiman. (2018). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82–95.
- Syafiie, I. K. (2019). *Ilmu Manajemen*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.

Usman, H., & Setiady Akbar, P. (2017). *Metodelogi Penelitian Sosial* (Edisi III; R. Damayanti, ed.). Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Wijayanto, SH, M.Hum, D. E. (2004). Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa. *Jurnal Independent*, 2(1), 40–50.